

Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM

Ani Diya Kanita Al Sihab^{1*}, Karolina A. Rewa², Yuniarti Reny Renggo³

¹⁻³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira
Wacana Sumba, Indonesia

Email: aniiediya2506@gmail.com^{1*}, karolina@unkriswina.ac.id², renyrennggo@unkriswina.ac.id³

*Penulis Korespondensi: aniiediya2506@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD) and Balance Funds on the Human Development Index (HDI) in 21 districts and 1 city in East Nusa Tenggara province in 2021-2025. This research is motivated by the low level of human development in several areas in East Nusa Tenggara Province and the high dependence of local governments on transfer funds from the central government. The approach used in this study is a quantitative approach using secondary data from the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province and the Directorate General of Financial Balance. The analysis technique used was panel data regression with the help of the Eviews8 program. The results of the analysis showed that Regional Original Revenue (PAD) had a positive but insignificant effect on the Human Development index (HDI), while the Balance Fund had a positive and significant effect on HDI in East Nusa Tenggara Province. Together, PAD and the Balance Fund have a positive effect on HDI. The results of this analysis show that the Balance Fund is still the main source of financing human development in East Nusa Tenggara Province because of the limited capacity of regional PAD. Therefore, local governments need to increase the effectiveness of PAD management and optimize the use of the Balance Fund so that human development can increase evenly and sustainably.*

Keywords: *Balance Fund; Fiscal Decentralization; HDI; PAD; Regional Autonomy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 21 kabupaten dan 1 kota di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pembangunan manusia di beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program Eviews8. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara bersama-sama PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap IPM. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena kemampuan PAD daerah yang masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD serta mengoptimalkan penggunaan Dana Perimbangan agar pembangunan manusia dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Perimbangan; Desentralisasi Fiskal; IPM; Otonomi Daerah; PAD.

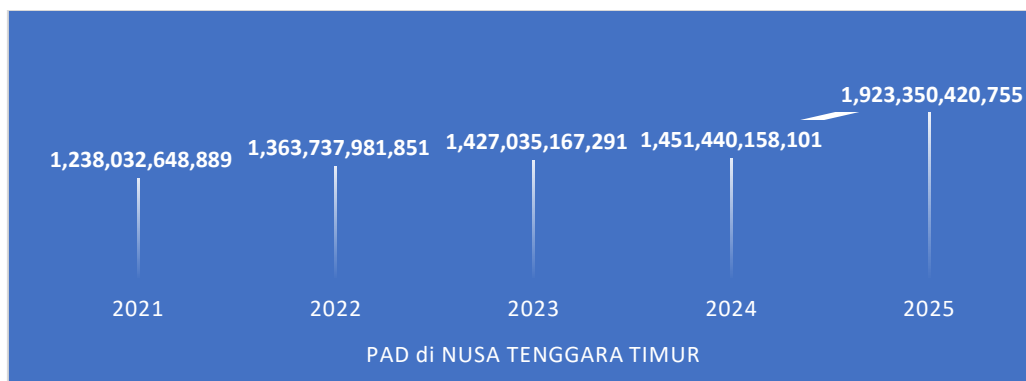
1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola sumber pendapatan secara efektif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan membantu pemerataan pembangunan antar daerah. Kedua sumber pendapatan ini

memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi sosial di daerah (Yudiastuti et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. PAD menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD yang dimiliki daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Sementara itu, dana perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta membantu daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik (Sembiring et al., 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis yang terdiri dari wilayah kepulauan serta keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di NTT. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan yang memadai agar mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Provinsi NTT.



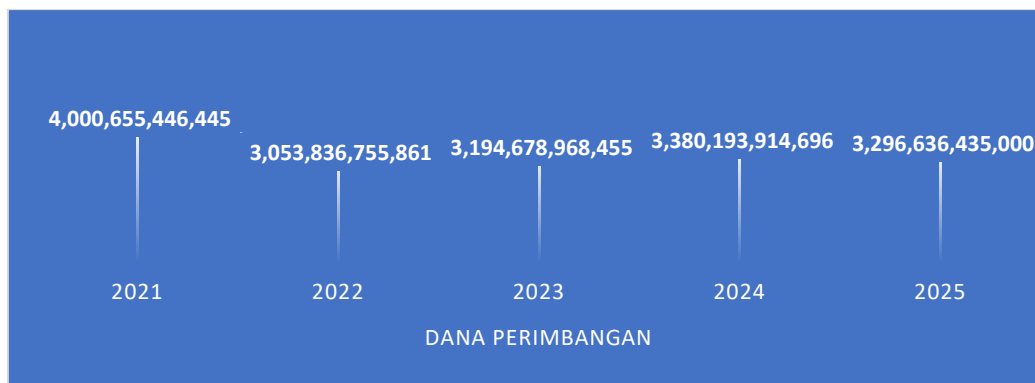
Gambar 1. PAD di Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2025.

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 1. PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2021-2025. Beberapa daerah seperti Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai menunjukkan peningkatan PAD yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota di Provinsi NTT juga mengalami peningkatan. Peningkatan PAD tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah di NTT mengalami perkembangan yang cukup baik. Kenaikan

PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah mulai berkembang dan pemerintah daerah semakin berupaya meningkatkan kemandirian fiskal.

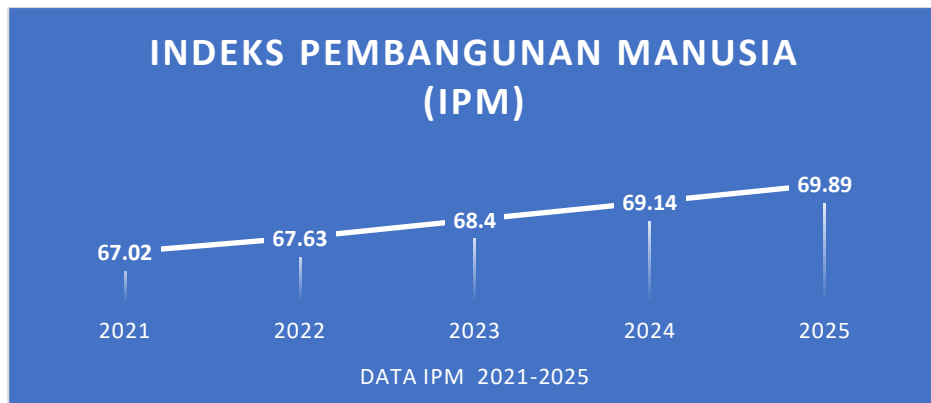
Namun, jika dilihat gambar 1, grafik kenaikan PAD dari tahun 2021-2024 masih meningkat secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah di NTT masih belum terlalu kuat dibandingkan daerah maju lainnya di Indonesia. Kenaikan yang cukup besar baru terdapat pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di NTT masih membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan untuk membiayai pembangunan daerah. Pada Gambar 1. PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah mengalami perkembangan yang positif. Akan tetapi, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD agar peningkatan pendapatan daerah tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup masyarakat di Provinsi NTT.



Gambar 2. Dana Perimbangan di Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2025.

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 2 Dana Perimbangan yang diterima daerah di Provinsi NTT mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah Dana Perimbangan mencapai Rp4,00 triliun, kemudian mengalami penurunan cukup besar hingga 23% pada tahun 2022. Setelah itu pada tahun 2023-2024 terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2025 Dana Perimbangan kembali mengalami penurunan 2,66%. Penurunan dana perimbangan pada tahun 2022 kemungkinan terjadi karena adanya penyesuaian anggaran pemerintah pusat setelah masa pandemi Covid-19 (Dhae et al., 2025). Pada periode tersebut pemerintah masih melakukan pemulihan ekonomi nasional sehingga beberapa alokasi dana transfer ke daerah mengalami perubahan. Selain itu, kondisi fiskal pemerintah pusat juga mempengaruhi besarnya Dana Perimbangan yang diterima setiap daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 3. IPM di Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2025.

Sumber: BPS Provinsi NTT

Selain peningkatan PAD dan Dana Perimbangan, data BPS di Provinsi NTT juga menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di NTT mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 rata-rata IPM Provinsi NTT berada pada kategori sedang dan terus meningkat hingga tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di Provinsi NTT mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan klasifikasi IPM menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Nusa Tenggara Timur masih termasuk dalam kategori sedang karena nilai IPM berada pada rentang $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ (Dhae et al., 2025). Meskipun mengalami peningkatan, nilai IPM di Provinsi NTT masih tergolong lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi NTT sudah mengalami perkembangan.

Peningkatan IPM tersebut berhubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan masyarakat. Dana yang berasal dari PAD dan Dana Perimbangan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang menjadi indikator utama dalam IPM. Seperti yang di jelaskan oleh Ina dan Hudang (2024) dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi NTT, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap IPM karena membantu pemerintah daerah membiayai pembangunan manusia. Selain itu Verawaty & Salwa (2023) juga menjelaskan bahwa pembangunan manusia berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Grafik IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pembangunan manusia di NTT mengalami perkembangan yang cukup baik, walaupun masih berada dalam kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi masih

perlu melakukan banyak perbaikan terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar nilai IPM di Provinsi NTT dapat terus meningkat sehingga bisa mendekati rata-rata nasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat *research gap* mengenai Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Selain itu, penelitian mengenai Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih relatif terbatas dibandingkan penelitian di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebaruan Penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan data terbaru tahun 2021-2025. Penelitian ini tidak hanya melihat Pengaruh PAD, Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menghubungkannya dengan kualitas pembangunan manusia melalui indikator IPM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi NTT.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah sesuai kebutuhan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dan menggunakan anggaran secara lebih efektif untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya daerah secara efisien (Yudiastuti et al., 2025). Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Awaludin & Wibowo, 2023).

Desentralisasi fiskal menjadi dasar teori karena PAD dan Dana Perimbangan merupakan bagian penting dari keuangan daerah. PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dari sumbernya sendiri, sedangkan Dana Perimbangan menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk membantu daerah yang kemampuan fiskalnya masih terbatas. PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah, sedangkan dana perimbangan masih menjadi sumber utama pendapatan bagi daerah yang PAD-nya rendah (Santi et al., 2024). Kewenangan daerah dalam mengelola APBD bertujuan agar pelayanan publik dapat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat (Handayani et al., 2022).

Teori Kemandirian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik dengan menggunakan pendapatan daerah sendiri. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD menjadi modal utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan menjadi ukuran kemandirian daerah dalam mengelola keuangan (Ama & Renggo, 2022). Peningkatan PAD harus didukung oleh kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menggali potensi daerah (Hunggurami & Renggo, 2022).

Kemandirian fiskal daerah tidak selalu mudah dicapai karena setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Daerah yang memiliki PAD rendah masih membutuhkan dukungan Dana Perimbangan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan menjadi tanda bahwa kemandirian fiskal pemerintah daerah masih perlu diperkuat (Idrus et al., 2025). Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara tepat (Rahardjo & Putra, 2023).

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah menjadi salah satu komponen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena digunakan sebagai sumber pembiayaan suatu daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Yudiastuti et al. (2025) menjelaskan bahwa pendapatan daerah memiliki peran penting dalam

mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari beberapa jenis penerimaan yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri maupun transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang tentang keuangan daerah, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketiga sumber pendapatan ini digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Santi et al. (2024) menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah dan pelayanan publik

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi daerah sendiri. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan sah lainnya. PAD menjadi salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Semakin besar PAD, maka semakin luas ruang pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Ama & Renggo (2022) menjelaskan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan menjadi ukuran kemampuan fiskal daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan jenis pajak daerah lainnya. Selain itu, retribusi daerah juga menjadi sumber PAD yang berasal dari pembayaran masyarakat atas jasa atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, parkir dan pelayanan umum lainnya. Hunggurami & Renggo (2022) menjelaskan bahwa peningkatan PAD dapat membantu pemerintah daerah memperluas pembiayaan pembangunan terutama pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur daerah. Utari et al. (2025) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Tebo, bahkan menjadi variabel yang paling dominan dalam penelitian tersebut. PAD juga berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kepulauan Riau (Rabiyah et al., 2026).

Meskipun demikian, pengaruh PAD terhadap IPM tidak selalu sama di setiap daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PAD belum tentu langsung meningkatkan IPM apabila tidak dikelola secara tepat. Karampuan et al. (2023) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Dana Bagi Hasil justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. PAD tidak berpengaruh terhadap IPM di

Kabupaten Tulungagung, sementara Dana Perimbangan dan pengeluaran pendidikan berpengaruh terhadap IPM (Soenarko & Hendrati, 2023).

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana ini bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan membantu pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik. Dana perimbangan diberikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (Bediona & Subarjo, 2022).

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk pemerataan kemampuan antar daerah dan membantu daerah membiayai kebutuhan pemerintah. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai program tertentu seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) berasal dari pembagian penerimaan pajak dan sumber daya alam antara pemerintah pusat daerah. Dana perimbangan memiliki hubungan terhadap peningkatan pembangunan manusia karena digunakan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat (Ina & Hudang, 2024). DBH dan DAK berpengaruh positif terhadap IPM di NTT, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap IPM (Ina & Hudang, 2024).

Dalam penelitian ini, dana perimbangan penting dikaji karena NTT masih membutuhkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan manusia. Dana perimbangan dapat membantu daerah dalam membiayai sektor pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini berasal dari hibah, dana darurat, bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, serta penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan program daerah, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Verawaty & Salwa (2023) menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Santi et al. (2024) juga menjelaskan bahwa seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki peran penting dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan program pelayanan masyarakat apabila PAD dan Dana Perimbangan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (Pratama et al., 2025). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan daerah sehingga perlu adanya langkah terencana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurhalimah et al., 2021).

Peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki daerah, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut digunakan. Jika PAD dan Dana Perimbangan dikelola dengan baik, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan melalui IPM (Nanda & Khusaini, 2024). Pembangunan manusia mencerminkan keberhasilan pembangunan regional, meskipun peningkatan fiskal daerah tidak selalu langsung diikuti peningkatan IPM jika pengelolaannya belum efektif (Juniantari et al., 2026).

Hubungan PAD dan Dana Perimbangan Terhadap IPM

PAD dan Dana perimbangan memiliki keterkaitan dengan IPM karena keduanya menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, sedangkan Dana Perimbangan membantu daerah yang masih mengalami keterbatasan fiskal. Malik et al. (2022) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, DAU berpengaruh negatif, sedangkan Dana Desa berpengaruh positif terhadap IPM di Sulawesi Selatan. Kurniasari (2021) juga menemukan bahwa PAD dan DBH tidak berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan DAU memiliki pengaruh terhadap IPM.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada wilayah NTT. Kondisi fiskal dan pembangunan manusia di setiap daerah berbeda, sehingga hasil penelitian di satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya. Dalam kondisi NTT, penelitian ini penting karena Dana Perimbangan masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama, sementara PAD perlu terus ditingkatkan agar pembangunan manusia dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang bisa dijadikan acuan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan: (1) Nurhalimah et al. (2021), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui belanja modal di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh langsung terhadap IPM. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas hubungan PAD, Dana Perimbangan dan IPM; (2) Rizkiyah & Anitasari (2023), melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian ini menjadi acuan karena menggunakan komponen Dana Perimbangan sebagai variabel yang berhubungan dengan IPM; (3) Soenarko & Hendrati (2023), melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pengeluaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IPM, sedangkan PAD berpengaruh negatif terhadap IPM. Penelitian ini relevan karena membahas variabel yang hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan; (4) Ina & Hudang (2024), melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan DAK berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap IPM. Penelitian ini menjadi acuan utama karena sama-sama berfokus pada Provinsi NTT dan membahas komponen Dana Perimbangan terhadap IPM; dan (5) Bediona & Subarjo (2022), melakukan

penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IPM, sedangkan PAD berpengaruh negatif terhadap IPM. Penelitian ini sangat relevan karena memiliki lokasi penelitian yang sama, yaitu di NTT.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat di simpulkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (2) Dana Perimbangan juga diduga memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, yaitu gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data yang digunakan mencakup 21 kabupaten dan 1 kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2021-2025. Adapun variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan Eviews 8. Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan menggunakan rumus pengujian statistik sebagai berikut:

$$\log IPM_{it} = \alpha_i + \beta_{1i} \log PAD_{it} + \beta_{2i} \log DP_{it} + e_i \quad \dots (1)$$

Di mana:

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia (%) pada kabupaten/kota ke- i pada tahun pada tahun ke- t , yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak.

α_i = Konstanta dalam model regresi, yang menunjukkan nilai dasar IPM apabila faktor internal dan internal bernilai nol.

β_{1i} = Koefisien regresi untuk variabel faktor internal

β_{2i} = Koefisien regresi untuk variabel faktor eksternal

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) pada kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t , yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan sah lainnya (Faktor Internal)

DP_{it} = Dana Perimbangan (Rupiah) pada kabupaten/kota ke- i pada tahun ke- t , yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pemerintah pusat (Faktor Eksternal)

e_i = *error term* atau variabel pengganggu yang menunjukkan adanya faktor lain di luar model penelitian yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga model yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model terbaik, dilakukan uji pemilihan model melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik yang terdiri dari uji t, uji F dan uji R^2 . Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sementara itu, uji f digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rentang waktu penelitian dari tahun 2021-2025. Pemilihan periode tersebut dilakukan karena data keuangan daerah dan data IPM pada periode tersebut telah tersedia dan dapat digunakan untuk melihat perkembangan kemampuan fiskal daerah serta kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengunduh data dari publikasi resmi BPS NTT dan DJPK. Data PAD dan Dana Perimbangan diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan data IPM diperoleh dari publikasi BPS NTT. Setelah data terkumpul, data kemudian diolah menggunakan program Eviews 8 untuk melakukan analisis regresi data panel. Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *Common Effect*

Model (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman.

Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effet Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut hasil uji chow dari penelitian ini adalah:

Tabel 1. Tabel Uji Chow.

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	92.309152	(21,86)	0.0000
Cross-section Chi-square	347.459957	21	0.0000

Berdasarkan tabel 4.1. Hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05) maka dari model CEM dan FEM model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Setelah dilakukan uji chow dan diperoleh bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian lanjutan menggunakan uji hausman. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model FEM lebih tepat digunakan dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Berikut hasil uji hausman dari penelitian ini adalah:

Tabel 2. Tabel Uji Hausman.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.630876	2	0.0049

Berdasarkan tabel 4.2. Dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) di bandingkan *Random Effect Model* (REM). Dilihat dari hasil pengujian nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0049. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05), maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IPM. Uji hipotesis ini bertujuan untuk membuktikan dugaan sementara yang telah dirumuskan dalam penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

Uji f

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap IPM. Hasil penelitian menunjukkan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000000 yang berarti PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Uji R²

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel PAD dan Dana Perimbangan dalam menjelaskan IPM. Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,968760 menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan IPM sebesar 96,87%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian

Uji t

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap IPM secara parsial. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh signifikan.

Berdasarkan hasil *Fixed Effect Model* (FEM), variabel PAD memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0592 sehingga PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun, nilai koefisien PAD sebesar 0,011620 menunjukkan hubungan yang positif. Sementara itu, Dana Perimbangan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien sebesar 0,105012.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \log IPM_{it} &= \alpha_i + \beta_{1i} \log PAD_{it} + \beta_{2i} \log DP_{it} + e_i \\ &= 1.037268 + 0.011620 PAD_{it} + 0.105012 DP_{it} + e_{1t} \end{aligned} \quad \dots (2)$$

$$t\text{-Statistic} = 1.912341 \quad 7.964915$$

$$Prob. = 0.0592 \quad 0.0000$$

$$Adjusted\ R\text{-squared} = 0.968760$$

$$F\text{-statistic} = 147.9699$$

$$Pob\ (F\text{-statistic}) = 0.000000$$

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.968760 yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 96,87%, sedangkan 3,13%

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pada 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2021-2025. IPM digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tiga aspek utama, yaitu, pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak. Semakin besar nilai IPM suatu daerah, maka semakin baik untuk kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh nilai konstanta sebesar 1.037268. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa jika PAD dan Dana Perimbangan dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan, maka nilai rata-rata IPM kabupaten/kota di Provinsi NTT diperkirakan sebesar 1.037268. Hal ini menunjukkan bahwa selain PAD dan Dana Perimbangan, masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IPM

Berdasarkan hasil *Fixed Effect Model* (FEM), PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun nilai koefisien PAD kecil, hal tersebut tetap memiliki arti penting karena perubahan IPM biasanya secara perlahan dari tahun ke tahun. Kenaikan IPM sekecil apa pun menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Di Provinsi NTT, Peningkatan PAD sebenarnya dapat membantu pemerintah daerah untuk menambah anggaran pembangunan manusia, namun pengaruhnya belum terlalu besar.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum mampu meningkatkan IPM secara langsung, karena PAD di beberapa daerah NTT masih rendah dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional daerah. Akibatnya alokasi anggaran untuk sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia seperti kesehatan dan pendidikan masih belum maksimal. Selain itu, kemampuan PAD setiap daerah di NTT juga berbeda-beda. Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat memiliki PAD yang cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang masih memiliki keterbatasan dalam potensi ekonomi daerah.

Apabila pemerintah bisa meningkatkan PAD dan menggunakannya secara efektif pada sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat, maka peningkatan IPM kemungkinan akan lebih terlihat dalam waktu yang lama. Artinya, peningkatan PAD perlu diikuti dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar manfaat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soenarko & Hendrati (2023) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian Karampuan et al. (2023) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Namun demikian, arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa PAD tetap memiliki potensi dalam mendukung pembangunan manusia apabila dikelola secara optimal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap IPM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih menjadi sumber pembiayaan penting dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di NTT. Peningkatan Dana Perimbangan memberikan dampak terhadap pembangunan manusia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Dana transfer dari pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, memperbaiki jalan, menyediakan air bersih, sanitasi dan berbagai pelayanan publik lainnya yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat di NTT.

Walaupun nilai koefisien sebesar 0,105 terlihat kecil secara angka, namun dalam hal IPM nilai tersebut cukup berarti karena perubahan IPM biasanya secara bertahap setiap tahun. Contohnya, apabila Dana Perimbangan meningkat dan digunakan secara efektif untuk pembangunan manusia, maka dampaknya dapat terlihat pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di Provinsi NTT. Kondisi geografis di NTT yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan biaya pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu, Dana Perimbangan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan manusia dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di NTT.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ina & Hudang (2024) dan Rahmadillah & Nurfaiza (2024) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IPM di NTT. Penelitian Rahmadillah & Nurfaiza (2024) yang menunjukkan DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur. Selain itu penelitian Bediona & Subarjo (2022) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap IPM di NTT. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Kurniasari (2021) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh langsung terhadap IPM. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Perimbangan terhadap IPM sangat dipengaruhi oleh bagaimana anggaran tersebut digunakan dan kondisi pembangunan di masing-masing daerah.

Secara teori, hasil penelitian ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat dapat membantu daerah meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk Provinsi NTT yang masih memiliki keterbatasan PAD, Dana Perimbangan menjadi sumber pembiayaan penting dalam mendukung pembangunan manusia.

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Dana Perimbangan masih menjadi faktor penting dalam meningkatkan IPM di daerah dengan PAD yang terbatas.

Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di NTT untuk meningkatkan pengelolaan PAD dan penggunaan Dana Perimbangan secara lebih efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara langsung karena kemampuan fiskal beberapa kabupaten/kota di NTT masih relatif rendah. Sementara itu, Dana Perimbangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih menjadi sumber pembiayaan utama dalam mendukung pembangunan manusia di Provinsi NTT, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Secara simultan, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap IPM, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki hubungan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi NTT masih sangat dipengaruhi oleh transfer dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD melalui pengembangan potensi ekonomi daerah agar ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa penggunaan Dana Perimbangan lebih

diarahkan pada program-program yang berlangsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu PAD dan Dana Perimbangan, sementara masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi IPM, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, periode penelitian yang digunakan hanya mencakup tahun 2021-2025 sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pembangunan manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Ama, D. R. T., & Renggo, Y. R. (2022). Pengaruh Pad Dan Belanja Modal Terhadap Pdrb Kabupaten Di Pulau Sumba Tahun 2015 - 2020. *Transformatif*, 11(1), 30. <https://doi.org/10.58300/transformatif.v1i1.314>
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, B. (2026). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2026* (B. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (Ed.)). Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Bps. <https://Web-Api.Bps.Go.Id/Download.Php?F=Jtziquu41rjee4nbtmcd8ev6rklzwehcmzfvnkrwc25na0tzzgz6yjrvt2fvaddhmljpcklrew9rdfjnqi9uazjrdmfl2raoupremvml1fvseduzwevmlg2dvy1rzk4zkvxudjiue1zrtnya2g5otnxxnrjz2c4egi1dnpzywkzamtou3zmtvngt2doohe1k2krak9fceyvsjdxypoej>
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, B. (2025). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2025* (B. N. T. Timur (Ed.)). Bps Provinsi Nusa Tenggara Timur. <https://Web-Api.Bps.Go.Id/Download.Php?F=Xxg2fde+Ksqrujrl5q9lsnpnbhhnyul3qtaruzflszdtbz bqnmvhw5wnjntnfdpqkv0ehu2k3nfujhuaglimnl4vtfl dy9dexryqy80uxhvmwvatwvpc1fscvm2qnhs3rgwfbdtluk3g0nhrsqnhtcnhws0wxqnhwrkybybgxjc0xyng9wmfq5q2vptkrumtntcfzvaenct2lra0ljym>
- Bediona, A. R. k., & Subarjo, A. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI UPAH MINIMUM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (n.d.). *Realisasi Apbd Tahun 2021-2025*.
- Dhae, F. P., Renggo, Y. R., & Hudang, A. K. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *TRANSFORMATIF: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(1), 10–32.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(1), 41–57. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>

- Hunggurami, A. A., & Renggo, Y. R. (2022). PENGARUH PAD DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Ekonomika*, 13(2), 161–174. <https://doi.org/10.35334/jek.v14i01.2553>
- Idrus, S. Y., Ibrahim, I. A., Saprudin, Gani, R., Radjak Masjhur, M. A., & Yakup, A. P. (2025). Dampak Ketergantungan Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 7(2), 321–333. <https://journal.universitaspdp.ac.id/index.php/econbank/article/view/34%0Ahttps://journal.universitaspdp.ac.id/index.php/econbank/article/download/34/17>
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718>
- Juniantari, R., Purwadinata, S., & Studi, P. (2026). PENGARUH PAD , DAK DAN DBH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI NTB TAHUN 2015-2024). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19(1), 261–271. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v19i1>
- Karampuan, A., Suharto, R. B., & Lestari, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 66–76.
- Kurniasari, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–23. www.bps.go.id.
- Malik, M., Sjarlis, S., & Gusti, D. H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(4), 661–675. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/2756>
- Nanda, R., & Khusaini, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(2), 427–437. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.2.8>
- Nurhalimah, F. A., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kota Surabaya. *Jurnal Ekobistek*, 10(2), 115–123. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.112>
- Pratama, N. S., Hamzani, U., Muhsin, M., Rusliyawati, R., & Karpriana, A. P. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(1), 16–26. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i1.1080>

- Rabiyah, S., Fatahurrazak, & Rikayana, H. L. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Kepulauan Ria. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 52–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/b4kkzz15>
- Rahardjo, B., & Putra, S. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 66–72.
- Rahmadillah, R., & Nurfaiza. (2024). Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 93–107. <https://doi.org/10.54526/jes.v9i1.277>
- Rizkiyah, J., & Anitasari, H. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 6(1), 1–6. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS>
- Santi, Y., Prasetyo, A., Widhi, E. nur, Hartanto, & Rahmatiyah. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Timur Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 4(2), 37–48. <https://doi.org/10.47709/jap.v4i2.5722>
- Sembiring, Diana, & Fakriah. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(4), 37–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i4.492>
- Soenarko, C. T., & Hendrati, I. M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pengeluaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economics Development Issues*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.152>
- Utari, L., Hariyadi, Hodijah, S., & Nurhayani. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun 2020–2024. *Journal of Sharia Economics*, 7(2), 66–74. <http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>
- Verawaty, & Salwa, S. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SILPA, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 37–55. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 51–69. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1570>